

ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan topik "Pengelolaan Sistem Ujian Negara Untuk Meningkatkan Fungsi Keluaran Pada Kantor Kopertis dan beberapa PTS berprogram studi Terdaftar dan Diakui di lingkungan Kopertis VII". Fokus Penelitian ini adalah mencari jawaban atas pertanyaan, sejauh mana efektivitas pengelolaan sistem ujian negara sehingga mampu berfungsi untuk meningkatkan standardisasi mutu lulusan PTS sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu lulusan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik. Agar studi deskriptif-analitik ini lebih bermakna maka digunakan pendekatan studi kasus-kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini tergolong ke dalam kategori penelitian kualitatif. Pengambilan sumber data (informasi) dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yakni berdasarkan pilihan peneliti, aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu secara terus-menerus sepanjang penelitian. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Pengolahan dan analisis data dilakukan selama maupun setelah data terkumpul dan bersifat tentatif.

Beberapa faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penyelenggaraan ujian negara dalam membedakan mahasiswa yang pandai, sedang dan asor adalah karena perilaku belajar mahasiswa yang cenderung malas yang berakibat kepada kurang persiapan dan berspekulasi dalam menghadapi ujian negara. Penelusuran lebih lanjut berhasil mengungkap bahwa penyebab kurang persiapan dan berspekulasinya mahasiswa dalam menghadapi ujian negara, yakni (1) mahasiswa belajar sangat tergantung kepada materi yang diberikan oleh dosen dalam kelas; (2) mahasiswa kurang dapat belajar secara mandiri; (3) dosen kurang memberikan arah dan panduan dalam proses belajar

mahasiswa dan (4) tidak adanya tabel spesifikasi yang memungkinkan mahasiswa belajar secara efektif untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti ujian negara. Di samping itu juga, dalam proses pembuatan soal kurang memperhitungkan tingkat kesukaran dan tidak adanya kepastian dalam kriteria dan prosedur pemeriksaan dan pemberian nilai hasil ujian. Namun demikian, faktor positif ujian negara ini telah memberikan motivasi belajar dan motif berprestasi dari mahasiswa, terutama manakala dihubungkan setelah mereka lulus dalam mencari pekerjaan.

Beberapa peluang dan kekuatan yang memungkinkan penyelenggaraan ujian negara lebih efektif untuk meningkatkan mutu lulusan PTS, yakni (1) penyempurnaan sistem ujian negara dengan ditetapkannya SK Dirjen Dikti No. 519/ Dikti/ Kep/ 1993 yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi Kopertis, PTS dan mahasiswa dalam menghadapi dan menyelenggarakan ujian negara, di samping memberikan wewenang yang lebih besar kepada Kopertis; (2) komputerisasi pengadministrasian dalam prosedur pengusulan berkas ujian negara, pelaporan dan dokumentasi hasil ujian negara; (3) terjalannya koordinasi dan kerjasama yang erat antara Kopertis, PTS (BM-PTSI), dan PTN; (4) adanya pembagian tugas dan pendelegasian wewenang sehingga memberikan otonomi keilmuan kepada para dosen penguji; (5) dengan pembiayaan ujian negara yang berprinsip kompensasi total berimbang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti ujian negara pada setiap periode, karena dengan prinsip ini pengelolaan biaya menggunakan subsidi silang, di samping anggota panitia ujian negara merasa cukup memadai honorarium yang mereka terima dan tidak berkeberatannya mahasiswa terhadap iuran UNC; dan (6) proses pembuatan soal yang sudah menggunakan prinsip kepraktisan.

Penelitian ini juga berhasil mengungkapkan beberapa faktor dominan yang menyebabkan kurang efektifnya penyelenggaraan ujian negara dalam meningkatkan mutu proses dan keluaran PTS melalui standardisasi mutu soal, proses belajar

simalkan peranannya dalam perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam menyusun kepanitiaan ujian negara; (2) kurang mendarahdagingnya budaya mutu dan masih melekatnya formalism dalam proses kegiatan di PTS ; (3) kurang efektifnya PTS dalam mengadakan umpan balik terhadap laporan hasil ujian negara; (4) kurang jelasnya pengelolaan biaya tambahan UNC yang dipungut oleh PTS; (5) tidak adanya ketentuan pertanggungjawaban baik mengenai prosedur dan persyaratannya maupun sanksinya; (6) dalam proses pembustan soal, Kopertis kurang memberdayakan Kelompok Program Studi Setempat (KPPS) sehingga dalam proses pembuatan soal masih bersifat subyektif dan kompromis yang tentu saja kurang memenuhi standar, kriteria, kaidah-kaidah dan persyaratan-persyaratan kerja dalam penyusunan instrumen tes (soal); (7) kurang memenuhi kaidah-kaidah, prosedur dan persyaratan-persyaratan kerja dalam penskoran dan pengolahan skor dalam pemeriksaan dan pemberian nilai hasil ujian negara.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut diperlukan pematapan dan pengembangan pengelolaan sistem ujian negara sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu proses dan keluaran PTS, bukan saja standar mutu proses dan penyelenggaraan ujian negara melainkan juga standar mutu proses belajar mengajar dan pengelolaan PTS sehingga upaya peningkatan mutu lulusan PTS akan memenuhi sasarannya.